

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk pengobatan modern yang berkembang dengan pesat adalah pengobatan dengan menggunakan antibiotik. Obat ini mampu menanggulangi berbagai jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Tingginya penggunaan antibiotik lebih dari satu jenis dan dalam waktu lama umumnya digunakan untuk penanganan komplikasi infeksi berat (Anonim, 2002).

Indonesia pada tahun 2010 sekitar 31,2 persen kematian disebabkan oleh penyakit infeksi. Berbagai studi menemukan bahwa sekitar 40 - 62% antibiotik digunakan secara tidak tepat antara lain untuk penyakit - penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik.

Menurut Mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, sekitar 92 % masyarakat di Indonesia tidak menggunakan antibiotik secara tepat sehingga dapat menimbulkan kerugian yang luas dari segi kesehatan, ekonomi bahkan untuk generasi mendatang (Anonim, 2011).

Hasil penelitian *Antimicrobial Resistantin Indonesia(AMRIN-Study)* terbukti dari 2494 individu di masyarakat, 43% *Escherichiacoli* resisten terhadap berbagai jenis antibiotik antara lain: ampicilin (34%), kotrimoksazol (29%) dan kloramfenikol (25%).

Antibiotik adalah zat – zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang memiliki khasiat yang mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya pada manusia relatif kecil. (Tjay dan Raharja, 2002).

Suatu konsekuensi yang tidak terelakkan dari penggunaan antibiotik adalah timbulnya mikroorganisme yang resisten. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat telah memotori peningkatan dalam pemunculan patogen – patogen yang resisten terhadap berbagai obat (Katzung, 2004).

Di indonesia telah dilakukan beberapa usaha untuk menghindari terjadinya resistensi , salah satu dari usaha tersebut adalah diberlakukannya undang – undang yang mengatur tentang penjualan antibiotik yang diatur dalam undang – undang obat keras st. No 419 tanggal 22 desember 1949, pada pasal 3 ayat 1 (Direktorat jendral kefarmasian dan alat kesehatan, 1949).

Walaupun pemerintah telah membuat undang – undang tentang penjualan antibiotik tapi sering terjadi kecerobohan Dokter umum ataupun petugas kesehatan dalam memberikan antibiotik. Mereka memberikan hanya berdasarkan pengalaman sehingga sering kali antibiotik yang diberikan tidak cocok dengan jenis kumannya sehingga mengakibatkan pasien mengalami kebal antibiotik.

Kondisi itu diperparah dengan buruknya pemahaman masyarakat dalam mengkonsumsi antibiotik. Mereka sering kali tidak mengkonsumsinya hingga tuntas karena merasa kondisi tubuh sudah membaik. Selain itu, buruknya pengawasan penjualan antibiotik juga membuat masyarakat bebas membeli antibiotik sehingga mereka tidak mendapatkan informasi tentang penggunaan antibiotik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul “ Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penggunaan Antibiotik di Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Tahun 2012.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penggunaan Antibiotik di Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Tahun 2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penggunaan Antibiotik di Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Program D-III Farmasi

Dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Terkumpulnya informasi tentang baik tidaknya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan antibiotik, dari informasi tersebut dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang penggunaan antibiotik sehingga dapat diterapkan dalam penggunaan antibiotik.

3. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

4. Bagi Instalasi Pemerintah

Diperolehnya informasi tentang pengetahuan masyarakat tentang penggunaan antibiotik, jika ternyata pengetahuan masyarakat masih kurang maka dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan instalasi yang terkait untuk lebih mengawasi distribusi antibiotik secara bebas.